



Strategi Pemanfaatan Modal Non Ekonomi Dalam Pemenangan Kandidat Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Pohuwato

Bala¹, Sukri², Ariana³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

¹bala.insetter@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the political phenomenon of the 2020 Regional Elections in Pohuwato Regency, which was conquered by figures with inadequate economic and financial capital. The purpose of this study is to understand and describe the strategy of maximizing the use of non-economic capital as part of the political strategy carried out to win in the regional election arena. The data collection method was conducted through documentation studies and in-depth interviews. Data analysis techniques consist of three steps: data reduction, data presentation, and conclusion drawing / verification. The results showed that the strategy of maximizing the capital was carried out by the winning figure with the strategy of understanding the habitude found among the Pohuwato people. So, from the results of the reading, it was concluded that the Pohuwato society is a plural society that upholds the prevailing customary values. The efforts are to build emotional closeness with traditional stakeholders and always keep every action from violating applicable customary values. The second strategy is the utilization of social capital by building trust, friendship, and loyalty, as well as owned social networks. The principle of leadership for all suggests that the figure of BC will stand above the interests of all factions. This strategy was developed in response to the condition of the plural Pohuwato society. The third strategy, the use of symbolic capital, was carried out by SM with his position as a representative of the local parliament, the support of his siblings as a Regents, the big family name Mbuinga, which is quite large and famous. Besides, the spouse of the deputy regent candidate is a female figure, former chairman of the Pohuwato Regency Parliament, a member of the Gorontalo Provincial Parliament, and she has a big family name in Pohuwato Regency.

Keywords: *Political Strategy; Local Elections; Capital*

Abstrak

Penelitian ini dimotivasi oleh fenomena politik pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato yang dimenangkan oleh figur dengan kepemilikan modal ekonomi dan finansial yang tidak memadai. Tujuan penelitian adalah memahami dan mendeskripsikan strategi maksimalisasi pemanfaatan modal non ekonomi sebagai bagian dari strategi politik yang dilakukan untuk pemenangan dalam arena pilkada. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan melalui prosedur reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dan atau verifikasi. Hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan strategi maksimalisasi pemanfaatan modal yang dilakukan figur pemenang, melalui: strategi pertama, memahami *Habitus* yang terdapat di kalangan masyarakat Pohuwato, sehingga dari hasil pembacaannya disimpulkan bahwa masyarakat pohuwato adalah masyarakat plural yang memegang teguh nilai-nilai adat istiadat yang berlaku. Upaya yang dilakukan adalah membangun kedekatan secara emosional dengan para pemangku adat, serta senantiasa menjaga agar setiap tindakannya tidak melanggar nilai-nilai adat yang berlaku. Strategi

kedua, pemanfaatan modal sosial dengan membangun kepercayaan, persahabatan, dan loyalitas, serta jaringan sosial yang dimiliki. Dengan prinsip kepemimpinan untuk semua menunjukkan bahwa figur SM akan berdiri di atas kepentingan semua golongan. Strategi ini dikembangkan sebagai respon atas kondisi masyarakat Pohnomo yang plural. Strategi ketiga, pemanfaatan modal simbolik, dilakukan SM dengan posisinya sebagai wakil DPRD, dukungan saudara kandung yang menjadi Bupati, nama besar keluarga dengan marga Mbuinga yang cukup besar dan terkenal, serta memilih pasangan calon wakil bupati yang merupakan tokoh perempuan, mantan ketua DPRD Kabupaten Pohnomo, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta juga memiliki nama dengan marga yang juga cukup besar di Kabupaten Pohnomo.

Kata Kunci : Strategi Politik; Pilkada; Modal

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah adalah sarana rekrutmen politik, yang dilakukan melalui proses penyeleksian oleh rakyat terhadap figur-figur yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota. Dalam kehidupan politik di daerah, pemilihan kepala daerah langsung adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan derajat kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi pada tingkat lokal. Menurut Suharizal (2011), dengan model pilkada langsung saat ini akan membuka ruang kompetisi yang adil dan *fair* diantara para kontestan yang ada. Dengan sistem kompetisi yang terbuka, diharapkan tidak muncul lagi figur-figur tertentu yang dikuasai oleh partai politik penguasa, dan menutup pintu bagi kandidat lain untuk terlibat dalam arena persaingan.

Prinsip utama dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah segala keputusan yang dihasilkan harus berdasarkan pada konsensus bersama, dan untuk melaksanakannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bermartabat. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi pemegang kunci utama dalam menentukan pilihan terhadap setiap pemimpin yang dipilih melalui proses pilkada. Makna hakiki dari pelaksanaan pilkada sebenarnya sangat berkaitan dengan bagaimana gerakan kolektif diciptakan secara demokratis untuk kepentingan yang bersifat kolektif pula. Tujuannya akhirnya adalah lahirnya pemimpin baru yang dipercaya mampu mengemban amanah rakyat dalam kerangka perlindungan masyarakat secara optimal melalui pengelolaan dan penciptaan kebijakan yang saling menguntungkan (Muhlis, 2021).

Upaya untuk memenangkan kontestasi politik dalam ajang pilkada, tidak terlepas dari kepiawaian para aktor dalam meraih simpati masyarakat pemilih melalui berbagai perumusan strategi politik. Urgensi strategi politik dalam konteks demokrasi, berangkat dari kesadaran bahwa dalam kompetisi politik apapun, masyarakat pemilih adalah mitra yang patut untuk menjadi fokus perhatian. Dalam konteks ini masyarakat adalah sasaran dari perumusan strategi politik yang disusun oleh kandidat. Menurut Firmanzah (2007) menjadikan masyarakat dan konstituen sebagai subjek dalam politik berarti menghargai keberadaan. Karena itu, masyarakat adalah entitas yang berdiri sendiri dan sejatinya harus dimengerti. Menarik simpati pemilih hanya dapat dilakukan jika aktor maupun partai politik memiliki kepedulian, serta dapat menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Senada dengan Firmanzah, Hendry (2012) menyatakan bahwa dalam konteks demokrasi, hak pribadi untuk menentukan diri secara politis harus menjadi prioritas, di atas agenda-agenda kepentingan politik lainnya. Kesempatan yang sama dalam berpartisipasi secara politik baik sebagai pemberi mandat atau diberi mandat, merupakan

cerminan keadilan fundamental yang berlaku ditengah masyarakat. Dengan demikian, urgensi strategi politik dalam konteks pilkada adalah memposisikan masyarakat sebagai mitra strategis, serta kemampuan memberi keyakinan akan kesanggupan untuk mengemban amanat dalam setiap proses suksesi politik.

Strategi politik menurut Schroder (2010) adalah keseluruhan langkah yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Salah satu bentuk khusus dari strategi politik adalah strategi kampanye. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, sehingga menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada upaya perbaikan kualitas kehidupan bermasyarakat. Strategi politik merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan politis, sehingga menurut Schroder dalam proses penyusunan strategi politik, sejatinya hal yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana kecermatan membaca strategi politik kompetitor. Oleh karena itu, setiap strategi yang dipilih harus mempertimbangkan profil kandidat, program kerja, kinerja serta kemampuan manajerial dari kandidat itu sendiri. Pada arena kontestasi politik, penggunaan strategi diarahkan pada keberhasilan memenangkan kursi kekuasaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan strategi jitu yang dapat mempengaruhi setiap proses untuk menuju pada tampuk kekuasaan. Dalam arena pilkada, penyusunan strategi politik harus dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga efektif untuk mempengaruhi dalam memberikan hak pilihnya. Menurut Firmanzah (2007) strategi politik sangat diperlukan dalam dunia politik terutama pada arena kontestasi. Dunia masa kini memang tidak sepenuhnya berubah dibanding dengan dunia masa lampau. Masa kini adalah kelanjutan dari masa lampau. Tetapi evolusi menuntut manusia untuk menerapkan cara-cara yang lebih tepat dan relevan, termasuk dalam kehidupan politik. Para politikus seyogyanya menggunakan cara-cara baru untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat.

Penelitian tentang strategi politik dalam konteks pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa penelitian itu antara lain: penelitian Saifuddin, Tastrawati, and Sari (2018), dengan menggunakan pendekatan teori permainan, fokus kajiannya adalah meneropong strategi politik yang dilakukan oleh kandidat pada pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2017, hasil penelitian menemukan adanya strategi pemanfaatan kesalahan lawan politik untuk memperoleh kesempatan menarik simpati masyarakat. Sedangkan penelitian Fatimah (2018) menyoroti adanya kegagalan dari perumusan strategi politik karena kekurangcermatan membaca kekuatan dan kelemahan lawan. Penelitian Hidayana (2011) menemukan adanya semacam praktik glembuk (penipuan secara terselubung dan masif) sebagai strategi yang dianggap efektif dalam memenangkan kontestasi. Penelitian Yuliani dan Hendra (2020) menggunakan pendekatan bourdieusian untuk mengamati strategi maksimalisasi modal ala Bourdeau oleh kandidat minoritas dalam memenangkan pilkada di Kabupaten Banjarnegara. Dari beberapa kajian yang telah dilakukan tersebut di atas, pada umumnya menitik beratkan pada kajian strategi politik, namun tidak mengulas lebih dalam tentang latar belakang sosial kandidat, serta sumber daya ekonomi secara terbatas yang dimiliki oleh kandidat.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus kajian ini adalah menguraikan strategi politik melalui upaya maksimalisasi pengelolaan modal non ekonomi oleh figur kandidat Saipul Mbuinga sehingga berhasil memenangkan pilkada di Kabupaten Pohuwato tahun 2020. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan figur Saipul Mbuinga akan menggunakan akronim SM. Analisis kajian akan menggunakan teori modal yang dicetuskan Pierre Bourdieu. Menurut Halim (2018) teori modal ala Bourdieu berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan. Titik awal dalam mengkonstruksi teori modalnya

adalah persoalan dominasi. Dalam sebuah masyarakat politik, persoalan dominasi termasuk persoalan utama sebagai salah satu bentuk aktualisasi kekuasaan. Dominasi tersebut bergantung pada situasi, sumber daya (kapital) dan strategi pelaku. Pemetaan hubungan kekuasaan didasarkan atas kepemilikan kapital-kapital dan komposisi tersebut.

Penggunaan teori Bourdieu dalam penelitian ini dianggap relevan, karena latar belakang sosial SM yang tidak memiliki modal finansial dan modal politik secara memadai, namun dapat memenangkan kompetisi politik di pilkada. Dalam kaitan dengan modal ekonomi, berdasarkan laporan harta kekayaan calon kepala daerah yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SM termasuk dalam kategori kandidat termiskin nomor 4 (empat) se Indonesia pada pilkada serentak tahun 2020. Total harta kekayaan yang disampaikan ke KPK adalah minus Rp -702.128.300. Sedangkan dari sisi modal politik, partai gerindra sebagai partai politik tempat afiliasi SM, juga bukan pemegang kursi mayoritas di legislatif Pohuwato. Partai gerindra hanya berada di urutan ketiga, dengan jumlah kursi sebesar 12 %. Data tentang komposisi perolehan kursi legislatif di Kabupaten Pohuwato pada pemilu tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Pada Pemilu 2019

No	Partai Pendukung	Jumlah Kursi	Persentase (%)
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	10	40 %
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	16 %
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3	12 %
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	8 %
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	8 %
6	Partai Demokrat (PD)	2	8 %
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	4 %
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	4 %
Jumlah		25	100 %

(Sumber: DPRD Kabupaten Pohuwato, diolah tahun 2022)

Berdasarkan data tentang komposisi perolehan kursi masing-masing partai politik di DPRD Kabupaten Pohuwato sebagaimana diuraikan pada tabel 1, dan merujuk ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, maka satu-satunya partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengusung calon bupati tanpa perlu membangun koalisi dengan partai politik lainnya hanya partai Golkar. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa: partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Dalam arena pilkada, jika kemenangan seorang kandidat hanya ditentukan oleh kekuatan modal ekonomi dan modal politik. Maka dapat dipastikan bahwa kandidat SM mustahil dapat memperoleh dukungan mayoritas partai politik, apalagi bisa memenangkan kontestasi pilkada. Namun demikian, dengan kepiawaiannya dalam penyusunan strategi politik, serta maksimalisasi pemanfaatan modal sosial, maka asumsi tersebut dapat dikesampingkan. Tabel berikut ini menunjukkan peta dukungan partai politik terhadap kandidat SM pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato.

Tabel 2. Peta Dukungan Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Pohuwato Tahun 2020

No	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Latar Belakang Profesi	Persentase Dukungan
1	Hamdi Alamri-Zairin T.D. Maksud	• Perseorangan	• Anggota DPRD Partai Golkar • Pengusaha	-
2	Ibrahim Bouty-Miswar Yunus	• Perseorangan	• Birokrat • Pengusaha	-
3	Iwan Sjafrudin Adam-Zunaidi Z Hasan	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) • Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	• Anggota DPRD Partai Golkar • Pengusaha	20 %
4	Saipul A Mbuinga-Suharsi Igrisa	• Partai Golkar • Partai Gerindra • PPP • Demokrat • PAN	• Anggota DPRD Kab. Partai Gerindra • Anggota DPRD Prov. Partai Golkar	80%

(Sumber: KPU Kabupaten Pohuwato, diolah tahun 2022)

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan kepiawaian SM dalam meyakinkan partai politik sehingga mampu meraih mayoritas dukungan partai politik pemilik kursi parlemen sebagai tiket dalam pencalonannya. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan figur SM cukup piawai dalam memaksimalkan modal non ekonomi yang dimiliki. Sebagai sebuah sumber kekuatan dan kekuasaan, modal dalam pandangan Bourdieu (1996) dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan terhadap hubungan antar kekuatan dan kekuasaan dalam komunitas sosial masyarakat. Meskipun dalam realitasnya modal memiliki peran penting, namun modal tidak berarti secara otomatis akan memiliki kekuatan yang signifikan di dalam suatu arena. Hal ini disebabkan setiap arena memiliki kebutuhan modal yang sifatnya spesifik, dan sangat mungkin terdapat perbedaan dengan kebutuhan pada arena yang lain. Sebagai contoh kekuatan modal ekonomi seseorang dalam arena kekuasaan boleh jadi efektif memampukannya untuk bertarung, namun dalam arena yang lain, dengan pertarungan pada aspek legitimasi, maka pada arena ini yang lebih dibutuhkan adalah modal kultural dan modal simbolik.

Mengacu pada uraian di atas, maka penelitian ini akan berusaha mengungkap dan mendeskripsikan bagaimana strategi yang digunakan oleh figur SM bersama tim pemenangannya dalam memanfaatkan modal non ekonomi yang dimiliki sehingga berhasil memenangkan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengungkap makna atas strategi pemanfaatan modal non ekonomi yang dilakukan oleh figur calon kepala daerah dalam memenangkan pilkada serentak tahun 2020. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Informan dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* dengan sasaran utama adalah kandidat, tim pemenangan, dan pengurus partai politik pendukung. Sedangkan data dokumentasi diperoleh dari arsip, dokumen dan berita tentang kandidat di media massa. Analisis data dilakukan melalui prosedur reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Prosedur reduksi data dilakukan melalui langkah pemilihan, pemusatan analisis untuk penyederhanaan,

penyusunan abstraksi atau pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan selama di lapangan. Dari hasil reduksi data, selanjutnya dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Proses kompetisi perebutan kekuasaan dalam kontestasi politik sangat berkaitan dengan strategi politik yang dilakukan oleh setiap kandidat. Strategi politik tidak terlepas dari ketepatan dan kecermatan dalam mengelola modalitas. Seorang figur dapat memenangkan kontestasi dalam arena pemilihan kepala daerah ketika kandidat yang bersangkutan mempunyai modal yang cukup kuat. Faktor modalitas menjadi urgen dalam arena politik pilkada, karena kontestasi tidak sekedar terjadi antar partai, melainkan persaingan antar kandidat dari partai yang sama sekalipun. Dalam beberapa momentum pilkada, kandidat yang sukses biasanya kandidat putra daerah atau telah mengenal daerah yang bersangkutan, figur yang sedang berkuasa, atau para mantan birokrat dan kepemilikan modalitas yang mumpuni (Permatasari, 2022).

Fenomena kemenangan figur Saipul Mbuinga inisial SM dalam pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato, tidak terlepas dari sinergi antara kecermatan membaca *Habitus* masyarakat Pohuwato dengan ketepatan dalam penentuan strategi politik. Salah satu strategi politik yang dilakukan adalah dengan maksimalisasi pemanfaatan modal non ekonomi yang dimiliki. Upaya maksimalisasi modal non ekonomi dilakukan karena SM sadar akan dirinya yang memiliki keterbatasan modal ekonomi/finansial. Konteks tulisan ini, akan menganalisis fenomena kemenangan SM dalam pendekatan teori sosial Bourdieu. Sebagaimana dipahami bahwa teori Bourdieu mempunyai ciri khas yang membedakan dengan pandangan ahli sosial lainnya dalam melihat modal dalam praktik sosial. Konsep yang diajukan adalah *Habitus*, *capital*, dan *field* sebagai kunci dalam memahami pemikirannya terutama dalam usahanya menautkan peran agen dan struktur.

Menurut Bourdieu (1996), dalam kompetisi politik apapun, modal dapat dikategorikan sebagai kekuatan yang spesifik dan berada atau beroperasi dalam ranah. Dan setiap ranah tertentu mengharuskan seseorang untuk memiliki modal khusus. Bourdieu memberikan ciri tertentu, bahwa setiap modal harus terakumulasi melalui aktivitas investasi sosial. Modal akan dimanfaatkan dalam sebuah kontestasi atau sebuah pertarungan. Sehingga modal dapat menjadi energi sosial yang hanya berada dalam arena dimana sesuatu memproduksi atau mereproduksi. Bourdieu memberikan kategorisasi modal dalam empat jenis, yakni; (1) modal ekonomi; (2) modal kultural yang dapat berupa berbagai pengetahuan yang sah; (3) modal sosial (hubungan yang bernilai dengan individu lainnya); (4) modal simbolik. Keempat modal tersebut memungkinkan untuk menciptakan atau membentuk struktur sosial.

Berdasarkan pandangan Bourdieu tersebut, maka dalam sebuah praktik sosial, setiap formula yang digunakan dalam perumusan strategi politik harus mampu menggabungkan unsur modal, *Habitus*, serta ranah. Menurut Yuliani dan Hendra (2020) dengan upaya memaksimalkan modal yang dimiliki, maka seseorang dapat mengaplikasikannya pada *Habitus* yang sudah ditentukan pada ranah pertarungan tertentu. Dalam konteks tulisan ini, pemanfaatan modal sosial, modal budaya, serta modal politik bagi SM adalah dalam rangka menarik simpati masyarakat. Dalam setiap momen kampanye, SM berjanji akan menempatkan masyarakat pada posisi dimana masyarakat dapat menuntut haknya kepada negara, yang salah satunya melalui pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan tema kampanyenya, yaitu berpolitik secara simpatik. Dengan strategi tersebut, masyarakat kemudian merasa diperhatikan eksistensinya oleh pemerintah. Sehingga SM pun sukses meraih dukungan mayoritas suara dari masyarakat Kabupaten Pohuwato.

Halim (2018) menegaskan bahwa dalam arena pilkada, umumnya para elit atau aktor politik di daerah telah mempersiapkan beragam modal sejak awal sebelum kompetisi dimulai. Hal ini dilakukan untuk memudahkan meraih kekuasaan di pentas lokal. Elit dari partai politik misalnya, berusaha memupuk modal sosial berupa jaringan kekuasaan di masyarakat, serta modal material berupa mesin partai. Melalui mesin partai, para elit partai politik di daerah bisa menguasai aset-aset ekonomi di daerah. Parpol sebagai modal sosial politik berfungsi sangat efektif, terlebih ketika parpol tersebut mempunyai masa militan dan loyal. Dan loyalitas konstituen merupakan aset besar bagi elit partai dalam meraih kekuasaan di daerah.

Berdasarkan konsep modalitas yang dibangun oleh Bourdieu sebagaimana diuraikan di atas, maka tulisan ini hendak menguraikan beberapa strategi ala Bourdieu yang dilakukan oleh figur SM bersama tim pemenangannya dalam upayanya memenangkan pilkada Kabupaten Pohuwato tahun 2020, antara lain:

1. Strategi Membaca Perilaku Pemilih Masyarakat Pohuwato

Pemahaman atas perilaku pemilih dalam kompetisi pada arena pilkada adalah salah satu strategi penting yang harus dimiliki oleh setiap calon kepala daerah. Menurut Tokan (2019) perspektif teori yang dapat digunakan untuk memetakan serta mendeskripsikan pola perubahan perilaku memilih dan menentukan pilihan politik pada proses pemilihan adalah dengan pendekatan *voting behavior approach*. Pendekatan ini berupaya menggali faktor-faktor yang mendorong seseorang memiliki kecenderungan menjatuhkan pilihan politiknya kepada partai politik tertentu atau figur tertentu dalam arena pemilihan umum atau pilkada.

Sementara itu, Dieter (2009) menguraikan bahwa setiap perubahan perilaku pemilih dapat dijelaskan dengan sejumlah pendekatan, antara lain adalah: pertama, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini sesungguhnya berorientasi pada beberapa aspek hubungan sosial individu dengan lingkungan sosialnya. Karena itu setiap individu selalu terikat di dalam berbagai lingkaran sosialnya, antara lain berupa: (1) status sosial ekonomi, seperti: tingkat pendidikan, jabatan dan jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas sosial; (2) agama, (3) etnik dan wilayah tempat tinggal seperti: kota, desa, daerah pesisir, ataupun pegunungan. Dengan demikian, maka studi perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis dapat dijelaskan dengan indikator-indikator tersebut. Pendekatan kedua adalah pendekatan psikologis. Menurut Dieter (2009) pendekatan ini berusaha menerangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih yang bersifat jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Pendekatan ini berusaha menjelaskan melalui relasi tiga aspek psikologis, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu-isu politik.

Berdasarkan uraian tentang pendekatan sosiologis dan psikologis dalam membaca perilaku pemilih, maka kandidat SM berusaha untuk mengakomodir semua tokoh yang dianggap representatif mewakili kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Termasuk pula materi kampanye yang dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan kepentingan masyarakat di kawasan tertentu. Hal ini sebagaimana dituturkan salah satu informan kepada peneliti.

Hal pertama yang dilakukan oleh kandidat SM dan tim kampanyenya adalah berusaha memahami perilaku dan keinginan kelompok masyarakat dalam suatu komunitas. Jadi misalnya kalau harus ke masyarakat nelayan, maka tim paling tidak mengajak tokoh masyarakat yang memahami tentang kehidupan masyarakat nelayan seraya mempelajari apa kebutuhan masyarakat disana, sehingga pada saat tim benar-benar turun bersosialisasi, maka materi kampanye telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Kalau berkunjung pada komunitas suku tertentu, maka

tim juga mengajak serta tokoh-tokoh yang dianggap dekat dengan komunitas masyarakat yang bersangkutan. Dengan kondisi ini maka tentu memudahkan dalam membangun komunikasi antara calon dengan masyarakat pemilih (informan GL).

Strategi yang dilakukan figur SM sebagaimana diuraikan di atas, relevan dengan apa yang jelaskan Ratri dkk (2017) bahwa setiap pemilih dalam menentukan pilihannya dihadapkan dengan berbagai alternatif pilihan, sehingga dibutuhkan beberapa pertimbangan sebelum memutuskan kepada siapa pilihan itu dijatuhkan. Dengan demikian, maka perilaku politik memberi gambaran tentang keberagaman karakter yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat dalam tatanan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, SM mendesain materi kampanye tidak terjadi keseragaman dalam satu kabupaten.

2. Strategi Pembacaan *Habitus* Masyarakat Pohuwato

Habitus dan modal dasarnya berada pada dimensi subjektif. Sedangkan dimensi objektifnya diletakkan pada ranah. *Habitus* dapat mempengaruhi terbentuknya ranah, sedangkan ranah menjadi lokus kerja dari *Habitus* (Bourdieu, 2010). Dalam konteks politik, *Habitus* dimanifestasikan dalam bentuk pemikiran atau cara pandang masyarakat serta harapan kedepan yang diinginkan terhadap kepemimpinan di Kabupaten Pohuwato. Sedangkan ranah dalam pengertian ini adalah arena pertarungan dalam hal ini panggung pilkada.

Habitus juga dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang diungkapkan habitualnya atau sesuatu yang terlihat dari tampak diri, pembawaan kondisi pada tipe seseorang. Merujuk pada pandangan B Dirk *et al* (Permatasari, 2022) konsep *Habitus* dapat dijabarkan dalam beberapa kondisi, antara lain: pertama, *Habitus* sebagai suatu kondisi yang sering dihubungkan dengan prasyarat akan keberadaan suatu kelas. Kedua, *Habitus* juga bisa merupakan dampak keahlian yang menjadi rujukan tindakan praktis, yang kadang tanpa harus disadari dan bakal menjadi suatu kemampuan yang dilihat alami serta tumbuh dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Ketiga, *Habitus* menjadi pondasi pada pemahaman untuk mengartikan dan memperkirakan kebenaran hasil dari implementasi kehidupan yang sesuai dengan struktur objektif. Keempat, *Habitus* dapat menjadi prinsip atau harkat yang diimplementasikan pada suatu tatanan moral yang tanpa disadari, tetapi mengatur perilaku harian, misalnya jujur, murah hati, orang yang rajin, cerdas, licik, dan lainnya. Kelima, *Habitus* juga merupakan pondasi dalam suatu aktivitas atas penataan kembali pola kehidupan yang tidak sepenuhnya diimplementasikan sebagai suatu keharusan, namun seseorang dapat memilih, tetapi tidak sepenuhnya bebas memilah (pilihan ditentukan oleh *Habitus*).

Secara sosiologis, Kabupaten Pohuwato adalah daerah tujuan transmigrasi sehingga masyarakatnya sangat pluralis. Selain itu, latar belakang penduduk yang multi etnis, seperti Bugis-Makassar, Minahasa, Arab, Jawa, Bali, dan suku Bajo. Serta keragaman agama yang terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan gambaran masyarakat tersebut, maka SM sejak menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, telah memahami betul *Habitus* masyarakat yang berkembang dalam arena ini. Sehingga paling tidak memiliki data awal sebagai bahan penyusunan strategi politik.

Masyarakat Pohuwato juga sangat kuat dalam menjunjung tinggi adat istiadat, sebagai tata nilai dalam melakukan interaksi sosial dan aktivitas keseharian. Oleh karena itu, bagi seorang pemimpin ataupun masyarakat biasa sejatinya harus menghargai proses adat yang berlaku. Hal ini dikarenakan nilai-nilai adat akan menjadi pegangan dalam menjalankan tugas sebagai bupati atau pemimpin di daerah. Menurut Husnan (2012) salah satu sistem nilai yang menjadi pegangan hidup masyarakat Gorontalo selain

agama, adalah sistem nilai yang diberikan oleh adat. Sistem ini memberikan ukuran dan ketentuan-ketentuan terhadap bagaimana sejatinya manusia bertutur, bertindak dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Sistem nilai yang terkandung dalam adat istiadat merupakan buah pemikiran yang mendalam dari raja-raja terdahulu. Nilai adat menjadi pedoman tentang bagaimana sebaiknya kehidupan masyarakat dapat diatur, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan damai dan harmonis. Sistem nilai dari adat berupaya menciptakan sistem yang menghadirkan keselarasan antara manusia dengan manusia, antara manusia dan alam, serta antara manusia dan sang pencipta.

Relasi antara adat dan pemerintahan yang terjadi di Gorontalo diwujudkan melalui kegiatan upacara adat Pohutu Momulanga. Pohutu Momulanga adalah suatu upacara adat yang dilaksanakan untuk penobatan dan penganugerahan gelar adat bagi pejabat pemerintah. Menurut Husnan (2012) upacara ini akan berhubungan dengan ketatanegaraan dan pemerintahan. Dikatakan demikian, karena upacara ini menobatkan dan menganugerahkan gelar adat kepada pejabat pemerintah yang pada hakikatnya, adalah pemegang tampuk pemerintahan diberikan penghargaan, diangkat derajatnya, agar punya wibawa di tengah-tengah masyarakat. Jabatan bupati atau walikota adalah suatu jabatan yang disamakan dengan jabatan seorang raja (*olongia*) pada masa kerajaan-kerajaan di Gorontalo sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Berdasarkan penuturan informan kepada peneliti.

Masyarakat Gorontalo pada umumnya, dan dalam hal ini juga termasuk masyarakat Pohuwato sejak dahulu sangat menjunjung adat istiadat. Hal ini juga merupakan pesan leluhur sejak dulu sebagaimana semboyan yang sudah membumi adat bersendi syara dan syara bersendi *kitabullah*. Sehingga pasangan SM sangat paham bagaimana masyarakat pohuwato sangat mengharapkan pemimpin yang tetap berpegang pada adat istiadat. Karena pada dasarnya adat istiadat Gorontalo tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai sebuah keyakinan yang dianut mayoritas penduduk Gorontalo.

Berdasarkan hasil pembacaan atas *Habitus* masyarakat pohuwato, maka sejak awal sebelum proses pencalonan sampai pada pelaksanaan kampanye, SM selalu meminta pandangan dari para pemangku adat dalam setiap kali akan mengambil keputusan. Bahkan sebelum pencalonan sebagai bupati, dirinya meminta pandangan dan restu dari pemangku adat perihal rencana untuk mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Pohuwato. Kedekatan SM dengan masyarakat Kabupaten Pohuwato bukan dimulai menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jauh sebelumnya SM saat masih menjadi anggota DPRD pada periode pertamanya senantiasa membangun komunikasi yang cukup intens bersama seluruh elemen-elemen masyarakat. Dengan strategi yang dilakukan oleh pasangan SM dalam membaca arah politik dalam panggung pilkada, maka dalam perspektif teori modal sebagaimana gagasan Bourdieu sangat membantu dalam memudahkan membangun komunikasi dengan masyarakat untuk menunjang kemenangannya dalam pilkada.

3. Strategi Pemanfaatan Modal Sosial, Simbolik, dan Budaya

Modalitas bagi figur yang berkompetisi dalam arena politik pilkada merupakan aspek penting untuk dikelola dengan baik. Menurut Ratri dkk (2017) modalitas dalam politik diibaratkan sebagai senjata yang harus dimiliki jika ingin memenangkan sebuah pertarungan, baik dalam arena pemilihan umum maupun dalam pilkada. Namun demikian, dalam panggung politik, modal tidak hanya berupa materi atau finansial, tetapi beragam jenis modal seperti modal sosial, simbolik, dan budaya yang seyogyanya harus dimanfaatkan dengan baik oleh setiap kandidat.

Dalam arena politik pilkada, menurut Asquith (2019) gagasan tentang modal sosial yang dicetuskan Bourdieu lebih tertuju pada sumber daya yang dianggap memiliki kekuatan aktual dan berpotensi memperoleh dukungan yang kuat dari kelompok masyarakat. Modal sosial yang dimaksud, antara lain jaringan, norma, dan sikap dan perilaku saling menjaga kepercayaan yang berlangsung secara terus menerus, dan diyakini dapat menghasilkan hubungan timbal balik berupa dukungan kolektif.

Selama ini yang terjadi dalam panggung politik tanah air, umumnya setiap kandidat menempatkan modal finansial di atas segalanya. Sehingga kebanyakan para elit sebelum mencalonkan diri, yang disiapkan terlebih dahulu adalah modal finansial, dan cenderung abai terhadap modal sosial dan modal lainnya. Namun, bagi figur SM modal finansial akan mengalir dengan sendirinya ketika modal sosial telah dikuatkan terlebih dahulu. Pertarungan dalam arena pilkada sangat ditentukan oleh kekuatan jaringan, sehingga pengelolaan modal sosial sama mendesaknya dengan pengelolaan modal finansial. Tabel dibawah ini menunjukkan realitas keterbatasan modal finansial yang dimiliki oleh kandidat SM namun justru mampu menggunakan dana kampanye yang tertinggi diantara kandidat lainnya. Perolehan dana kampanye yang besar tersebut diperoleh karena kemampuan memanfaatkan jaringan sosial yang tersedia.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Harta Kekayaan Calon dengan Dana Kampanye Yang Digunakan

No	Nama Calon	Jumlah Harta Kekayaan	Jumlah Dana Kampanye
1	Hamdi Al Amri	Rp. 580.718.066	Rp.166.401.000
2	Ibrahim Ben Bella Bouty	Rp.14.534.900.000	Rp. 37.462.848
3	Iwan Sjafruddin Adam	Rp. 1.609.179.981	Rp. 77.500.000
4	Saipul Mbuinga	Rp. -702.128.300	Rp. 438.159.784

Sumber: KPU Kabupaten Pohuwato, data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan kepiawaian figur SM dalam mengelolah modal sosialnya, sehingga sekalipun dinobatkan sebagai kandidat termiskin, namun mampu meyakinkan masyarakat dan para donatur sehingga berhasil mendapatkan sumbangan dana kampanye yang tertinggi di antara kandidat lainnya.

Gagasan Bourdieu tentang modal sosial sebagai modal penting dalam rangka memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat dan menaikkan kepercayaan publik terhadap figur tertentu. Kepercayaan publik adalah kunci utama untuk mendapatkan posisi atau kekuasaan dalam arena pertarungan politik pilkada (Permatasari, 2022). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa seorang kandidat yang memiliki modal sosial yang tinggi dan modal ekonomi yang minim, akan terbuka peluang untuk memenangkan kontestasi dan mengalahkan kandidat yang memiliki modal ekonomi yang kuat namun lemah dari sisi modal sosial.

Sebagai figur yang lahir dan dibesarkan di Kabupaten Pohuwato, SM telah memiliki modal sosial yang kuat. Selain sebagai anggota DPRD Kabupaten Pohuwato selama dua periode, SM juga adalah saudara kandung bupati sebelumnya yang memegang jabatan selama dua periode. Dengan kekuasaan yang dimiliki SM tersebut, maka selama sang adik yang menjabat bupati dan SM yang menjabat wakil ketua DPRD selalu aktif untuk turun menyerap aspirasi masyarakat di akar rumput. Namun demikian, setiap bertemu dengan elemen masyarakat, SM selalu berusaha menahan diri untuk tidak menyampaikan keinginannya secara terang-terangan perihal rencana pencalonan bupati. Namun ketika di detik-detik terakhir saat masa jabatan bupati yang sekaligus kerabat dekatnya akan berakhir di periode kedua, serta memperhatikan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat maka SM dengan penuh keyakinan mendeklarasikan dirinya untuk maju bertarung dalam perhelatan pilkada tersebut.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan SM, maka pendekatan teori sosial Bourdieu untuk menganalisis strategi dalam kontestasi politik, akan melahirkan pandangan bahwa seseorang yang memahami *Habitus*, dan menguasai kapital yang memadai akan menguasai arena dan memenangkan pertarungan sosial, karena di dalam arena selalu terjadi pertarungan sosial. Setiap aktor menerapkan strategi dan perjuangan tertentu untuk bisa menempati suatu ranah. Untuk itu, diperlukan penguasaan atas modal-modal, terutama modal simbolik yang dapat menghasilkan kekuasaan. Meskipun demikian, kekuasaan tidak hanya berasal dari modal simbolik, tapi juga bisa berasal dari modal yang lain. Dengan demikian, maka strategi politik sebagai salah satu cara untuk memperjuangkan posisi tawar aktor dalam arena kontestasi. Selain itu, dalam kategori ranah, umumnya pemenang kontestasi politik sangat ditentukan oleh aktor yang mendapat kepercayaan publik yang paling banyak.

Dalam arena praktik sosial, pemanfaatan nilai sejatinya menggunakan formula yang menggabungkan unsur modal, *Habitus*, serta ranah. Sehingga dengan maksimalisasi modal yang dimiliki, maka seorang aktor dapat mengaplikasikannya pada *Habitus* yang sudah ditentukan pada ranah pertarungan politik. Dalam konteks ini, figur SM mencoba memanfaatkan modal sosial-budaya dan politik dalam upaya memenangkan kontestasi melalui penarikan simpati masyarakat. SM mencoba menempatkan masyarakat pada posisi yang tinggi. Lazimnya, dengan bentuk negara Indonesia yang republik, maka seyogyanya segala keputusan tertinggi harus didasarkan pada kehendak mayoritas publik. Upaya mendengar kehendak rakyat, telah dipraktekkan sejak menjadi wakil ketua DPRD, sehingga masyarakat kemudian merasa dihargai eksistensinya. Hal ini pun juga diperkuat dengan jargon politik santun dan simpatik yang diusungnya, sehingga efektif dalam meraih dukungan suara dari masyarakat Kabupaten Puhuwato.

Dalam upaya perumusan strategi politik yang dilakukan oleh kandidat SM, modal dapat dianalogikan sebagai sebuah pelumas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemenangan dirinya. Oleh karena itu, tanpa modal apapun, niscaya strategi politik apapun yang dilakukan hanya akan menjadi konsep tanpa praktek. Namun demikian, menurut SM modal tidak melulu berkaitan dengan materi, dan masyarakat juga tidak mesti harus diukur suaranya dengan materi. Modal yang berada dalam ranah politik diaplikasikan melalui kampanye politik dengan narasi kepemimpinan untuk semua. Pemilihan tema ini didasarkan atas kondisi masyarakat Puhuwato yang plural, sehingga menurut SM sangat tidak tepat bila hanya memperhatikan satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu saja.

Dalam arena kontestasi, konsep penting lainnya yang juga menjadi penentu adalah ketika agent berhasil menyesuaikan diri pada setiap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, bagi Bourdieu modal tidak selalu berasosiasi pada benda berupa uang atau materi lainnya, kendati uang adalah modal yang paling mudah dikonversi untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan modal lainnya. Adapun modal lain yang dimaksud oleh Bourdieu adalah modal sosial, sebuah modal yang bisa berbentuk relasi sosial yang beragam. Modal lainnya adalah modal budaya atau legitimasi secara intelektual, atau hal lain yang diperoleh secara kebudayaan bisa saja keturunan yang feodalistik, dan yang paling prestisius adalah *symbolic capital* karena adanya posisi kehormatan pada relasi tersebut (Jenkins, 2006).

Sementara itu, modal budaya juga sangat penting untuk dimiliki oleh seorang kandidat. Menurut Permatasari (2022) modal budaya dikenal sebagai modal yang berkaitan dengan pribadi seseorang berupa kepemilikan wawasan pengetahuan yang bernilai budaya, dan dapat berfungsi sebagai relasi sosial pada sebuah sistem ekonomi yang menjadi penentu kedudukan sosial seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang

mempunyai wawasan objektif mengenai seni dan budaya, lalu memiliki cita rasa budaya dan preferensi yang baik, akan berpotensi meraih simpati dari masyarakat, dan memenangkan kontestasi dalam arena politik.

Secara konkrit, dengan berkaca pada realitas yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Pohuwato, dan ditengah keterbatasan modal ekonomi yang dimiliki oleh kandidat SM, maka strategi politik melalui maksimalisasi pemanfaatan modal sosial, budaya, dan politik dilakukan antara lain, melalui: pertama, maksimalisasi modal sosial dalam kampanye politik telah dilakukan sejak menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Pohuwato selama dua periode. Selama proses tersebut, SM membangun komunikasi politik dengan semua lapisan masyarakat. Semua organisasi paguyuban telah dirangkul, dengan senantiasa mengedepankan prinsip kepemimpinan untuk semua. Melalui prinsip ini SM meyakinkan kepada seluruh masyarakat Pohuwato yang multi etnis, bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dipelihara kelak ketika menjadi pemimpin. Oleh karena itu, dalam struktur tim suksesnya merangkul hampir semua perwakilan kelompok masyarakat, dan juga perwakilan partai politik pengusung.

Kedua, upaya memaksimalkan modal budaya dilakukan SM sejak menjadi wakil ketua DPRD dengan membangun kedekatan secara personal dengan para pemangku adat. Selain itu, beliau berupaya agar setiap tindakannya baik selaku individu mau sebagai wakil ketua DPRD didasarkan pada nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat Gorontalo. Ketiga, pemanfaatan modal simbolik, dilakukan SM dengan posisinya sebagai wakil ketua DPRD, dan dukungan saudara kandungnya yang menjabat sebagai bupati Pohuwato selama dua periode. Selain itu, modal simbolik yang dimiliki SM adalah marga yang melekat pada namanya. Sebagaimana diketahui bahwa marga Mbuinga adalah salah satu marga yang tergolong sebagai keluarga besar di Kabupaten Pohuwato. Strategi pemanfaatan modal budaya lainnya adalah memilih calon wakil bupati dari tokoh perempuan yang juga anggota DPRD Provinsi Gorontalo, mantan ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, serta memiliki marga Igrisa yang juga cukup besar di Kabupaten Pohuwato.

Tabel 4. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Hamdi Alamri – Zairin TD Maksud	10.474	11.58
2	Ibrahim Bouty – Miswar Yunus	15. 605	17.25
3	Iwan S Adam – Zunaidi Z Hasan	27. 200	30.06
4	Saipul Mbuinga – Suharsi Igrisa	37. 190	41.11
Total		90.469	100

(Sumber: KPU Kabupaten Pohuwato)

Dari keseluruhan strategi yang diterapkan oleh figur SM dalam arena pilkada terbukti berhasil dan dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian tentang strategi pemanfaatan modal non ekonomi dalam pemenangan kandidat pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, figur SM berupaya memahami *Habitus* yang terjadi di kalangan masyarakat Pohuwato. Dari hasil pembacaannya disimpulkan bahwa masyarakat Pohuwato adalah masyarakat yang plural dan masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat yang berlaku. Berdasarkan realitas tersebut, maka posisi pemangku adat sangat dihormati. Strategi SM adalah membangun

kedekatan secara emosional dengan para pemangku adat, serta terus menjaga agar setiap tindakannya tidak melanggar nilai-nilai adat. Kedua, strategi pemanfaatan modal sosial dilakukan SM dengan upaya membangun kepercayaan, persahabatan, dan loyalitas, serta pemanfaatan jaringan yang dimiliki. Dengan prinsip kepemimpinan untuk semua dikembangkan sebagai respon atas kondisi masyarakat Pohuwato yang plural. Ketiga, strategi pemanfaatan modal simbolik, dilakukan SM dengan posisinya sebagai wakil DPRD, dukungan saudara kandung yang menjadi bupati, nama besar keluarga dengan marga Mbuinga yang cukup besar dan terkenal, serta memilih pasangan calon wakil bupati yang merupakan tokoh perempuan, mantan ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta juga memiliki marga Igrisa yang juga cukup besar dan terkenal di Kabupaten Pohuwato.

Daftar Pustaka

- Asquith, L. (2019). *Bourdieu and Social Capital. In Rebuilding Lives After Genocide*. New York: Springer International Publishing.
- Bourdieu, P., & Richardson, J. G. (1986). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. *The forms of capital*, 241, 258.
- Bourdieu, P. (1996). *The rules of art: Genesis and structure of the literary field*. California: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2007). *Language and Symbolic Power*. Malden: Polity Press.
- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Roth, D. (2008). Studi pemilu empiris: Sumber, teori-teori, instrumen dan metode. *Jakarta: Friedrish-NaumannStiftung fur die Freiheit*. Jakarta: Mizan Publika.
- Evens, T. M. S. (1999). Bourdieu and the Logic of Practice: Is All Giving Indian-Giving or is “Generalized Materialism” Not Enough? *Sociological Theory*, 17(1), 3–31.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5-16.
- Firmanzah, M. P. (2007). *Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Halim, A. (2018). *Politik Lokal*. Malang: Intrans Publishing.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2005). *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hendry. (2012). *Pemilu Dan Kisah Perjalanan 2 Roh*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hudayana, B. (2011). Glembuk: Strategi Politik dalam Rekrutmen Elite Penguasa di Desa Pulungan Sari Yogyakarta. *Humaniora*, 23(1), 1-15.
- Husnan, Moh. I. (2012). Pohutu Momulanga: Gelar Adat di Gorontalo. *Jurnal Al- Ulum*, 12(1), 175–200.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.
- Krisdinanto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 189-206.
- Martono, N. (2018). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern Posmodern, dan Poskolonial*. Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. New York: sage.
- Muhlis. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 116–141.

- Permatasari, I. R., Bainus, A., & Akbar, I. (2022). Pemanfaatan Modal Sosial Pasangan Idris-Imam Dalam Pemenangan Pemilihan Walikota Depok Tahun 2020. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 29-42.
- Pratiwi, C. S. (2020). Analisis Perilaku Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Pada Politik Lokal Tahun 2018. *Khazanah Intelektual*, 3(3), 557–569.
- Putra, F. (2003). *Partai politik dan kebijakan publik : analisis terhadap kongruensi janji politik partai dengan realisasi produk kebijakan publik di Indonesia 1999-2003*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratri, I. K., Amaliatulwalidain, & Isabella. (2017). Strategi Pemenangan Yan Anton Ferdian Di Pilkada Langsung Kabupaten Banyuwasin 2013. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1).
- Ritzer, G., Djohar, W. A., Pasaribu, S., Widada, & Adinugraha, E. (2011). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifuddin, A., Tastrawati, N. K. T., & Sari, K. (2018). Penerapan Konsep Teori Permainan (Game Theory) dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik: Studi Kasus Strategi Pemenangan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2017. *E-Jurnal Matematika*, 7(2), 173–179.
- Schröder, P. (2010). *Strategi Politik*. Friedrich-Naumann-Stiftung Fuer die Freiheit.
- Suharizal. (2011). *Pemilukada*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tokan, F. B. (2019). Analisis perilaku memilih pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 39–52.
- Yuliani, K., & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Kandidat Minoritas Memenangkan Pilkada: Analisis Strategi Politik dalam Bingkai Bourdieusian. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1).